e-ISSN: 2963-4776; p-ISSN: 2963-5942, Hal 146-157

**DOI:** https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3

# Analisis Perekonomian Kota Blitar Khususnya Pada Tingkat Makro

#### Fitri Elmawati

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Email: fitrielmawati4@gmail.com

### Niken Bagas Firmansyah

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Email: nikenbagas302@gmail.com

#### **Muhammad Yasin**

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Email: yasin@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis: fitrielmawati4@gmail.com

Abstract. Regional development is the driving force for national development, which makes regional governments the planners to carry out various kinds of economic transformation for the welfare of the existing society. Broadly speaking, the components that must be discussed in the regional macroeconomic analysis concern economic production and income, growth, unemployment, inflation, employment, external trade relations, financial institutions, regional finance, and poverty or social welfare. Regional macroeconomic analysis can at least show the face of the regional economic structure where this will determine the sustainability of the economy in accordance with development goals. The economic growth of a region, especially the City of Blitar, which of course comes from the results of regional taxes, regional levies, management of regional assets, and other legal regional revenues, which aims to provide flexibility to the regions to seek funding in the implementation of regional autonomy as a manifestation of the principle of decentralization and to increase PAD and support government activities and national development, a budget from the regional government is needed, one of which is from the regional tax sector. In one course experiencing economic stability and problems of economic growth. One of the main problems or drivers of economic instability that can disrupt economic growth is the occurrence of general and continuous price increases or better known as inflation.

**Keywords**: economic growth, PAD, inflation rate.

Abstrak. Pembangunan daerah merupakan motor penggerak untuk pembangunan nasional, yang menjadikan pemerintah daerah sebagai perencana untuk melakukan berbagai macam transformasi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat yang ada. Secara garis besar komponen yang harus dibahas dalam analisis makro ekonomi daerah menyangkut produksi dan pendapatan ekonomi, pertumbuhan, pengangguran, inflasi, ketenaga kerjaan, hubungan perdagangan eksternal, kelembagaan keuangan, keuagan daerah, dan kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat. Analisis makro ekonomi daerah paling tidak dapat menunjukkan wajah struktur perekonomian daerah dimana hal tersebut akan menetukan keberlangsungan ekonomi sesuai dengan tujuan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah khususnya Kota Blitar, yang tentunya bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada

Received April 30, 2023; Revised Mei 02, 2023; Juni 01, 2023 \*Corresponding author, e-mail address

e-ISSN: 2963-4776; p-ISSN: 2963-5942, Hal 146-157

daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi dan untuk meningkatkan PAD dan menunjang kegiatan pemerintahan serta pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah daerah, salah satunya dari sekto pajak daerah. Dalam suatu tentunya mengalami kestabilan ekonomi serta masalah-masalah pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah atau pendorong ketidakstabilan ekonomi yang utama yang dapat menganggu pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya kenaikan harga secara umum dan terus-menerus atau yang lebih dikenal dengan inflasi.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, PAD, laju inflasi.

#### LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi tentu tidak lepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Pembangunan daerah merupakan motor penggerak untuk pembangunan nasional, yang menjadikan pemerintah daerah sebagai perencana untuk melakukan berbagai macam transformasi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat yang ada. Untuk mewujudkan dan melaksanakan tujuan pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Pembahasan tentang Makro Ekonomi Daerah pada konteks kekinian tidak hanya terkait dengan persoalan makro ekonomi secara sempit, yakni tentang keseimbangan sisi supply dan demand pada level aggregate yang meliputi keseluruhan pasar barang dan jasa, pasar uang dan modal, serta pasar faktor produksi. Akan tetapi, disamping hal yang telah disebutkan itu, ia juga menyangkut issue-issue pembangunan yang aktual, seperti tingkat kemiskinan dan kesejateraan sosial masyarakat. Secara garis besar komponen yang harus dibahas dalam analisis makro ekonomi daerah menyangkut produksi dan pemdapatan ekonomi, pertumbuhan, pengangguran, inflasi, ketenaga kerjaan, hubungan perdagangan eksternal, kelembagaan keuangan, keuagan daerah, dan kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat.

Analisis makro ekonomi daerah paling tidak dapat menunjukkan wajah struktur perekonomian daerah dimana hal tersebut akan menetukan keberlangsungan ekonomi sesuai dengan tujuan pembangunan. Pembangunan tidak boleh pincang hanya pada sektor tertentu tetapi memerlukan keterpaduan dan keseimbangan. Ketimpangan dapat menimbulkan pengaruh negatif terutama jika pertumbuhan hanya terfokus pada sektorsektor yang tidak menjamin berjalannya prinsip sustainable development.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus perkembang pesat ditengah memburuknya ekonomi global. Bila dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap bertahan walaupun terjadi krisis finansial yang melanda Amerika Serikat. Bahkan negara Singapura yang sekarang mungkin sudah dapat dikategorikan negara maju, petumbuhan ekonominya sempat mengalami minus ditahun 2009 akibat krisis tersebut. Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan

pemerintah menurun setiap tahunnya. Menurut catatan Bank Indonesia cadangan devisa Indonesia juga terus naik dari tahun ke tahun. Kuat tidaknya fundamental perekonomian suatu negara sangat mempengaruhi kemampuan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang cukup banyak dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, karena tanpa pajak kehidupan sebuah negara tidak akan berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Karena itu, pajak dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara. Dengan banyaknya pajak yang terkumpul maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pendapatan dapat berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sa Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2021 tumbuh sebesar 4,28%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,28 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,89 %.

Pertumbuhan dan kestabilan ekonomi merupakan tujuan semua negara untuk mencapai pembangunan nasional yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Baik negara maju maupun negara berkembang mengalami kestabilan ekonomi serta masalah-masalah pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah atau pendorong ketidakstabilan ekonomi yang utama yang dapat menganggu pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya kenaikan harga secara umum dan terus-menerus atau yang lebih dikenal dengan inflasi. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar, dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi ialah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh- mempengaruhi.

e-ISSN: 2963-4776; p-ISSN: 2963-5942, Hal 146-157

#### KAJIAN TEORITIS

### **Pengertian Inflasi**

Menurut Boediono (1999) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara menyeluruh dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar harga barang-barang lain yaitu harga makanan, harga makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, harga sandang, harga kesehatan, harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga, harga transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadi inflasi, yaitu:

- Kenaikan harga, yaitu apabila harga suatu komoditas menjadi lebih tinggi dari harga periode sebelumnya.
- Bersifat umum, yaitu kenaikan harga komoditas secara umum yang dikonsumsi masyarakat bukan merupakan kenaikan suatu komoditas yang tidak menyebabkan harga naik secara umum.
- Berlangsung terus menerus, kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat misalnya kenaikan harga pada saat lebaran atau tahun baru bukan merupakan inflasi.

Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi adalah suatu keadaan dimana jumlah barang yang beredar melebihi jumlah uang yang beredar sehingga harga barang-barang menjadi turun, dan nilai uang menjadi naik.

# Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peruundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiyaan

pembangunan daerahnya apabila pencapaian presentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

#### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengana- lisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan variabel lainnya (defisit anggaran, openness, inflasi, dan populasi) terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang ekonomi publik dan sebagai referensi penelitian selanjutnya, serta memberi masu- kan dan informasi bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan semua pihak yang tertarik dengan kajian pengaruh anggaran pemerintah terutama pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini mengunakan data sekunder berupa data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, lain – lain PAD yang sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan sumbangan pemerintah pusat. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan alat analisis kuantitatif, untuk mengetahui besarnya kontibusi dan efektifitas dari sumber - sumber PAD terhadap besarnya PAD. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kemandirian keuangan daerah Kota Blitar dari pengelolaan PAD yang ada selama tahun anggaran 2016 sampai 2019.

e-ISSN: 2963-4776; p-ISSN: 2963-5942, Hal 146-157

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam melihat kondisi perekonomian di suatu negara. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan produk domestik bruto (PDB). Dimana PDB dihitung berdasarkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Produk Domestik Bruto digunakan untuk berbagai hal khususnya untuk melihat performa perekonomian di suatu negara. Dengan membandingkan nilai PDB dari satu periode dengan periode sebelumnya akan terlihat laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ataupun penurunan dalam laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Stabilitas ekonomi merupakan tujuan utama suatu daerah maupun negara. Untuk dikatakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, jika daerah tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa untuk daerahnya danmenjaga stabilitas ekonominya pada tingga yang stabil dan baik. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik maka akan berdampak baik juga pada masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dikatakan masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 7,06% pertumbuhan ini lebih baik dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun sebelumnya sebesar 5,02%. Perbaikan kinerja ekonomi ditopang oleh investasi yang tumbuh kuat yang disertai dengan ekspor luar negeri yang membaik dari tahun sebelumnya meskipun pergerakannya masih terbatas.

Grafik. 4.1 Pertumbuhan Ekonomi



Dari grafik. 4.1 Dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih mengalami fluktuasi selama periode tahun 2014-2020. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01% kemudianmengalami penurunan sebesar 0,13% pada tahun 2015 dengan tingkatpertumbuhan ekonomi sebesar 4,88%. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% dan terus mengalami peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi selama 2 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,07%, tahun 2018 sebesar 5,17%. Dan pada tahun 2019 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 5,02%, dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 merupakan

tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode 2014-2020 yang menunjukkan bahwa pada tahun ini terjadi kestabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada perekonomian Kota Blitar tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 7,11 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 4,92 triliun. Ekonomi Kota Blitar tahun 2021 tumbuh sebesar 4,28 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,28 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,89 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor sebesar 3,76 persen.Dari sisi produksi, struktur ekonomi Kota Blitar tahun 2021 didominasi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 66,81 persen.

Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar 2019-2021

	Laju Pertumbuhan Ekonomi								
Jumlah Kota Blitar Ka		Kabi	Kabupaten Blitar		Kota Kediri				
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Jumlah	5.84	-2.28	4.28	5.12	-2.29	3.02	5.47	-6.25	2.50

Source Url: https://blitarkota.bps.go.id/indicator/52/43/1/laju-pertumbuhan-

ekonomi.html

Access Time: May 27, 2023, 11:27 pm

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah terdiri dari:

#### • Pendapatan asli daerah meliputi

- 1. Pajak daerah;
- 2. Retribusi daerah;
- 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

e-ISSN: 2963-4776; p-ISSN: 2963-5942, Hal 146-157

- 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pendapatan transfer dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Biasanya salah satu komponen pendapatan asli daerah yang belum tergali secara optimal yaitu lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup:

- 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 3. Jasa giro;
- 4. Pendapatan bunga;
- 5. Tuntutan ganti rugi;
- 6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan pendapatan asli daerah agar dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Blitar Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2016–2019

Actual Blitar Municipal Government Revenues by Kind of Revenues (thousand rupiahs), 2016–2019

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues		2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	131 920 190 721	194 764 731 103	163 026 005 753	166 140 178 781
1.1	Pajak Daerah/Regional Tax	<u>26 001</u> <u>646 560</u>	38 995 899 849	40 501 229 760	44 650 054 610
1.2	Retribusi Daerah/Regional Retribution	9 658 868 726	7 776 649 664	9 940 599 576	10 138 463 906
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Da	1 023 333 373	1 053 268 432	1 104 657 721	1 169 069 219
1.4	Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	95 236 342 062	146 938 913 159	111 479 518 695	110 182 591 047
2	Dana Perimbangan/Balance Funds	622 676 097 741	562 579 364 596	626 534 717 931	617 074 500 118

2.1	Bagi Hasil Pajak/Tax	37 660	33 778 174	33 311	38 722
	Sharing Revenue	901 579	632	778 801	150 634
	Bagi Hasil Bukan	18 880	16 587 434	67 464	55 197
2.2	Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Re	139 043	797	332 495	441 211
	Dana Alokasi	428 743	421 212	421 212	437 776
2.3	Umum/General Allocation Fund	959 000	306 000	306 000	459 000
	Dana Alokasi	137 391	91 001 449	104 546	85 378
2.4	Khusus/Special Allocation	098 119	167	300 635	63 376 449 273
	Fund	098 119	107	300 033	449 273
2	Lain-lain Pendapatan yang	92 591	93 598 262	104 848	157 508
3	Sah/Other Revenue	471 551	542	452 349	571 201
		10 294		16 907	17 063
3.1	Pendapatan Hibah/Grant	19 284			
	1	423 542	-	320 645	503 000
3.2	<u>Dana Darurat/Emergency</u> <u>Fund</u>				
	Dana Bagi Hasil Pajak dari	60.046	74.576.222	72 100	07.140
3.3	Provinsi dan Pemerintah	60 846	74 576 332	73 188	87 140
	Daerah La	898 009	542	601 704	709 201
	Dana Penyesuaian dan	5 000 000	7.500.000	12,000	51 420
3.4	Otonomi Daerah/Regional	5 000 000	7 500 000	13 000	51 430
	Adjustment	000	000	000 000	800 000
	Bantuan Keuangan dari	7.460.150	11 521 020	1 750 500	1 072 550
3.5	Provinsi atau Pemerintah	7 460 150	11 521 930	1 752 530	1 873 559
	Daerah Lain	000	000	000	000
3.6	Lainnya/Others				
	· ·	847 187	850 942	894 409	940 723
	Jumlah/Total	760 012	358 241	176 033	250 100
C	r · Padan Pangalala Kayangan		<del>-</del>		

Sumb: Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah

Sourc: Financial Management adnd Asset Office of

Blitar Municipality

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan lain – lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar rata – ratanya sangat baik. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu melakukan upaya secara efisien dan terus menerus untuk meningkatkan penerimaan sumber – sumber PAD yang ada nantinya dapat dikembangkan sesuai potensi yang ada. Dalam melihat penerimaan sumber - sumber PAD maka dilihat dengan cara perhitungan dan analisis untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2019.

### 3. Inflasi

Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar, dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancaran distribusi

e-ISSN: 2963-4776; p-ISSN: 2963-5942, Hal 146-157

barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi ialah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh- mempengaruhi.

Tabel Inflasi yang terjadi di Kota Blitar 2017-2019

Dulan	Inflasi					
Bulan	2017	2018	2019			
Januari	0,94	0,14	0,15			
Februari	0,70	0,26	-0,08			
Maret	-0,13	0,10	0,16			
April	0,38	0,14	0,36			
Mei	0,50	-0,17	0,05			
Juni	0,44	0,43	0,08			
Juli	-0,11	0,09	0,44			
Agustus	-0,17	-0,10	-0,23			
September	0,31	0,20	-0,27			
Oktober	-0,12	0,16	-			
November	0,23	0,40	-			
Desember	0,43	0,29	_			

Pada November 2019 terjadi inflasi sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 138,60. Dari 82 kota IHK, 57 kota mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 3,30 persen dengan IHK sebesar 140,99 dan terendah terjadi di Malang sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 136,92. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,06 persen dengan IHK sebesar 146,21 dan terendah terjadi di Batam dan Denpasar masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 137,96 dan 133,54.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,37 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,12 persen; kelompok sandang sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,23 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transpor, komunikasi,

dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–November) 2019 sebesar 2,37 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2019 terhadap November 2018) sebesar 3,00 persen.

Komponen inti pada November 2019 mengalami inflasi sebesar 0,11 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–November) 2019 sebesar 2,91 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (November 2019 terhadap November 2018) sebesar 3,08 persen. Dampak yang ditimbulkan oleh inflasi yaitu dampak positif dan dampak negatif tergantung tingkat keparahan yang ditimbulkan inflasi. Jika inflasi itu ringan, maka akan menjadi pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, karena disertai dengan meningkatnya pendapatan nasional dan membuat orang semangat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu padasaat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah variabel PDRB tahun sebelumnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan konvergen yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, demikian pula variabel openness, sumberdaya alam, lokasi, dan variabel desentralisasi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk bukan angkatan kerja jumlahnya cukup besar sehingga menurunkan rata-rata produktivitas penduduk yang menjadi angkatan kerja yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga pada variabel inflasi memberikan dampak negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengendalikan harga untuk jangka panjang tidak mampu mendu- kung pertumbuhan ekonomi, tetapi justru sebaliknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Upaya dalam mengendalikan laju inflasi, pemerintah harus dapat menekan laju inflasi melalui kebijakan moneter jangka panjang yaitu dengan melakukan pengendalian dan penekanan terhadap harga-harga. Jumlah uang beredar harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan sasaran inflasi daerah. Inflasi juga dapat dikendalikan dengan cara mengendalian tingkat suku bunga. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengatur tingkat suku bunga yang diterapkan di sebuah daerah sehingga dapat menghambat pemutaran uang yang beredar di masyarakat. Sekiranya pemerintah terus memperbaharui dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi inflasi baik itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.Hasil penelitian ini masih bersifat agregat dan belum menganalisis hubungan kedua variabel tersebut secara lebih rinci. Namun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang pengeluran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Diharapkan ada studi lebih jauh yaitu analisis peran kebijakan fiskal dalam pertumbuhan ekonomi yang memisahkan antara kebijakan fiskal

e-ISSN: 2963-4776; p-ISSN: 2963-5942, Hal 146-157

untuk kepentingan produktif seperti investasi publik dan kepentingan yang tidak produktif seperti konsumsi rutin.

#### DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Yani. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Elim, I., & Ersita, M. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis.
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan. Jurnal Akuntansi, 2(1), 24. <a href="https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96">https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96</a>.
- Lakoy, T. W., Engka, D. S. ., & Tumangkeng, Y. . S. (2016). Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(01), 559–567.
- Barro, Robert (1990). "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth", Journal of Political Economy.
- Cheng, Benjamin S and Tin Wei Lai (1997). "Government Expenditures and Eco-nomic Growth in South Korea: A VAR Approach", Journal of Economic Development.
- Dwi Sutatmi, Bernadetta (2008). Makro Eko- nomi Indonesia: Prospek Ekonomi 2008 Perkembangan Terkini 2007. Jakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi IBII.
- Alexander, M. 1994. Biodegradation and Bioremediation. Academic Press, New York.
- Alejandro, Portes. 1976. "On the Sociology of National Development: Theories and Issues". American Journal of Sociology.
- Kuncoro, Mudrajad, 1997.Ekonomi Pembangunan(teori,masalah,dan kebijakan). UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
- Setiono, Ns Dedi, 2011. Ekonomi Pengembangan Wilayah-Teori dan Analisis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.